TAJUK RENCANA

Birokrasi Belum Bebas Korupsi

DI saat pemerintah sedang gencar-gencarnya memerangi Covid-19, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bikin kejutan dengan melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah (NA). Nurdin diamankan bersama 5 orang lainnya karena diduga terlibat korupsi pembangunan infrastruktur jalan. Mereka langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan penyidik KPK. KPK juga menyita uang Rp 1 miliar sebagai barang bukti.

Banyak pihak terkejut dengan penangkapan tersebut. Pasalnya, selama ini Nurdin dikenal bersih dan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan sehat. Terlebih saat ia menjabat sebagai Bupati Bantaeng (2013-2018), ia menjadi inspirator dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan sehat. Untuk itulah, banyak penghargaan yang ia peroleh, antara lain Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) tahun 2017. Pada tahun yang sama, Ia juga meraih penghargaan atas predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) 2017. Setahun sebelumnya, ia mendapat Tanda Bintang Jasa Utama Bidang Koperasi dan UKM dari Presiden Joko Widodo.

Penangkapan Nurdin seolah menampar muka lembaga pemberi penghargaan. Apakah penghargaan itu akan ditinjau kembali, atau dicabut, tentu menjadi kewenangan lembaga yang bersangkutan, meski diakui penghargaan tersebut diberikan sebelum Nurdin menjabat Gubernur Sulsel, melainkan masih sebagai Bupati Bantaeng. Perihal kontroversi pemberian penghargaan kepada Nurdin, hemat kita, adalah persoalan lain yang tidak terkait langsung dengan kasusnya.

Kita hanya bisa mengingatkan bahwa sebelum memberi penghargaan, hendaknya diteliti dulu rekam jejak calon penerima agar tidak salah sasaran. Bisa saja pihak pemberi penghargaan menyatakan bahwa penilaian hanya dilakukan sebelum yang bersangkutan menerima penghargaan, sedang setelahnya tak lagi terkait dengan lembaga pemberi penghargaan. Padahal, idealnya gelar atau penghargaan bisa dicabut bila penyandangnya tak mampu menjaga integritas.

Kita mengapresiasi langkah KPK yang melakukan OTT terhadap Gubernur Sulsel dan sejumlah orang, termasuk pihak kontraktor. Peristiwa ini mengingatkan kita pada pernyataan sejarawan moralis Inggris John Emerich Edward Dalberg Acton yang kemudian dikenal dengan Lord Acton (1833-1902), "power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely" (kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak korup seratus persen).

Saat menjabat Bupati Bantaeng Nurdin dikenal bersih dan punya integritas, sehingga panen penghargaan. Selanjutnya, pada 2018 ia kembali meraih jabatan birokrasi tertinggi di Sulsel yakni menjadi gubernur. Barangkali dari sinilah banyak godaan sehingga dalil Lord Acton berlaku, ia terjerat kasus korupsi dan diamankan KPK. Sejak Minggu dini hari status Nurdin Abdullah telah resmi dinaikkan dari terperiksa menjadi tersangka. Ia pun harus menempati sel tahanan KPK dan mendapatkan kostum oranye sebagai tahanan.

Walau demikian, kita tetap mengingatkan penegak hukum untuk menerapkan asas praduga tak bersalah. Artinya, ia tak boleh dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Pelajaran penting dari kasus tersebut, penghargaan setinggi apapun yang diterima seorang tokoh, tak menjamin ia tetap konsisten, apalagi memegang kekuasaan dalam kurun waktu lama dan banyak godaan. Karenanya, kekuasaan harus terus dikontrol, termasuk oleh rakyat.

Perginya Pendekar Hukum, 'Algojo Koruptor'

(In Memoriam Artidjo Alkostar)

Nandang Sutrisno

Innalillahi wa innailaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Dr Artidjo Alkostar SH LLM, anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) pada hari Minggu (28/2) jam 14.00 WIB.

BERITA yang dengan cepat menyebar baik di media massa lokal, nasional maupun di media sosial. Walaupun sudah mengetahui sakitnya beliau beberapa bulan terakhir ini, berita tersebut tetap membuat saya terhenyak dan lunglai mendengar perginya pendekar ëAlgojo Koruptorí. Karena kabar terakhir beliau sudah sehat.

Penulis tidak punya kedekatan secara pribadi, kami tidak lebih hanya† sebagai murid, sebagai kolega, sebagai bawahan beliau. Walau penulis sempat diamanahi sebagai wakil dekan, wakil rektor, bahkan sebagai rektor di Universitas Islam Indonesia (UII). Meskipun demikian, keberadaan beliau† selalu abadi di hati.

Menginspirasi

Sebagai mahasiswa beliau era tahun 1980-an, saya bangga punya dosen yang selain sangat ëberbobotí tapi juga terkesan dengan keseharian beliau yang sangat sederhana. Dengan mengendarai BMW (Bebek Warna Merah), mahasiswa menyambut dengan antusias kehadiran beliau untuk mengajar. Meskipun tanpa sistem presensi canggih seperti saat ini, hampir tidak ada mahasiswa bolos kuliah. Rugi besar kalau tidak hadir.

Salah satu materi yang beliau sampaikan adalah hasil risetnya di lingkungan orang-orang pinggiran terutama yang menjadi korban pembangunan dengan metode partisipatif. Hasil riset yang dibukukan dengan judul ëKesepian di Tengah Keramaianí telah menginspirasi mahasiswa terlebih aktivis untuk senantiasa peduli terhadap mereka yang pada umumnya terlanggar hak azasinya.

Keberpihakan Pak Artidjo kepada yang lemah diimplementasikan dalam praktik di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum (LKBH FH) UII. Di lembaga inilah semangat membela yang lemah dipraktikkan mahasiswa dengan dibimbing para dosen dan advokat melalui penanganan perkara yang sesusungguhnya. Kombinasi antara dunia akademis dan praktik inilah yang dikenal dengan Pendidikan Hukum Klinis (Clinical Legal Education). Model FH UII ini kini dijadikan salah satu model internasional.

KR-JOKO SANTOSO

Selain kepedulian, mahasiswa juga terinspirasi dengan keberanian beliau melawan ketidakadilan, terutama terhadap kesewenangan penguasa. Kata ëtakutí tidak ada dalam kamus Artidjo Alkostar. Ancaman verbal dan fisik tidak membuatnya gentar dalam mengadvokasi korban ketidakadilan. Kepedulian dan keberanian semakin jelas saat menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta yang saat itu menonjol dalam menangani kasus-kasus yang sifatnya struktural.

Hakim Agung

Salah satu kenangan yang tidak mungkin saya lupakan adalah ketika beliau baru saja menjabat sebagai Hakim Agung. Beliau bercerita di depan para dosen, betapa dahsyatnya godaan, terutama godaan duniawi. Beliau mengatakan : *"Saya bisa kaya dalam satu malam.î* Tentunya kalau mau berbuat curang menerima suap atau gratifikasi. Penulis yang mendengarkan langsung cerita beliau menjadi ciut nyali untuk mengikuti jejaknya. Terus terang, takut tidak kuat menahan godaan.

Perjalanan karir sebagai Hakim Agung selama 18 tahun, adalah perjalanan luar biasa, dijalani dengan husnul khotimah. Sangat kebal suap dan gratifikasi serta senantiasa gigih melawan korupsi dan koruptor melalui 'palu'-nya. Tidak heran banyak orang yang menjuluki pendekar hukum ini sebagai ëAlgojo Koruptorí.

Banyak yang menyayangkan ketika ditunjuk menjadi anggota Dewas KPK. Tetapi bagi Artidjo tugas pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti karena kelemahan hukum. Kehadiran sebagai anggota Dewas telah membantu KPK, di tengah keraguan masyarakat, untuk tetap berkinerja baik memberantas korupsi.

Sebagai tokoh nasional, Artidjo tidak melupakan asalnya, UII. Masukan konstruktif untuk kemajuan kampus adalah menjadikan UII *Centre of Excellence*. Cita-cita mulya yang akan selalu diupayakan para Rektor UII dari waktu ke waktu. Selamat jalan Pak Artidjo Alkostar. ❑

) Dr Nandang Sutrisno,
Dosen FH UII Yogyakarta.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Kebahagiaan Memperkuat Imunitas

KEBAHAGIAAN merupakan muara dari segala aktivitas, daya upaya, pergumulan, serta perjuangan kehidupan manusia. Ini tujuan yang universal dan abadi. Adakah makhluk yang tidak mendambakan kebahagiaan? Dalam konteks ini, semua sepakat bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir dari semua makhluk di sepanjang sejarah bahkan sampai selama-lamanya.

Penelitian ekstensif yang dilakukan oleh Seligman, Peterson, dan Lyubomirsky (2005) menemukan bahwa ada tiga faktor utama yang memengaruhi kebahagiaan. Ketiga faktor itu adalah faktor bawaan (S-Set range), situasi lingkungan (C-Circumstances), dan faktor yang dapat dikendalikan oleh pribadi yang bersangkutan (V-Voluntary activities). Menurutnya, perbandingan dominasi pengaruh dari ketiganya adalah sebagai berikut. Set range atau faktor genetik diperkirakan berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang dengan bobot 50 persen. Sedangkan circumstances atau faktor lingkungan diperkirakan dapat memengaruhi kebahagiaan seseorang hanya dengan bobot 10 persen saja. Dan selebihnya, voluntary activities atau hal-hal yang dapat dikendalikan oeh masing-masing pribadi berpengaruh sekitar 40 persen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa H = S+C+V.

Kebahagiaan dalam kehidupan manusia sangat erat kaitannya dengan faktor set range yang berfungsi sebagai stabilisator tingkat kebahagiaan seseorang. Kita bersyukur, karena dengan adanya set range, berbagai peristiwa yang kita khawatirkan tidak memiliki daya dan alasan untuk ditakutkan.

Kebanyakan manusia akan pulih lagi sekalipun mengalami berbagai hal yang tidak mengenakkan dalam kehidupannya. Ingat, berdasarkan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa set range punya kekuatan terbesar (sekitar 50 persen bila dibandingkan dengan kedua faktor lainnya dalam menentukan kebahagiaan kita. Tidak terkecuali dalam situasi serba sulit seperti sekarang ini.

Dalam situasi pandemi Covid-19 yang belum berakhir, kebahagiaan mutlak diperlukan untuk memperkuat imunitas tubuh. Hidup akan terasa bermakna tergantung bagaimana sikap kita dalam memaknai dan menciptakan suasana menyenangkan serta menggembirakan dalam keseharian.

) Athiful Khoiri MPsi,
Pascasarjana Psikologi UAD Yogya.

Menata Ulang UU ITE

Pangky Febriantanto

UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE kembali menjadi perhatian publik. Meski telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, namun revisi tersebut tidak memberikan banyak perubahan terkait ketentuan pidana. Selaras dengan berbagai desakan, Presiden Joko widodo pun melontarkan wacana revisi kembali di awal 2021. Terutama revisi terkait pasal-pasal yang sering menjadi polemik.

Apabila dikaji lebih mendalam, UU ITE bagaikan 2 sisi mata uang. Di satu sisi, UU ITE sebenarnya lahir untuk memberikan payung hukum terhadap aktivitas dunia digital yang sehat dan beretika. Juga untuk memberi perlindungan Warga Negara dalam melakukan transaksi secara elektronik. Di sisi lain, UU ITE justru dapat dijadikan tameng untuk mengkriminalisasikan pihak yang berseberangan pendapat dan menjadi ancaman bagi kemerdekaan berekspresi.

Tensi Politik

Pro-kontra terhadap UU ITE dimulai dari kasus Prita Mulyasari pada tahun 2008 yang bahkan berlarut-larut hingga selesai pada Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Konstitusi tahun 2012. Tidak berhenti sampai di situ, kontroversi terhadap kasus-kasus hukum yang menggunakan UU ITE masih berlanjut hingga terakhir kontroversi Dino Patti Djalal yang dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik karena mengangkat kasus pencurian sertifikat tanah pada awal Februari 2021. Tercatat, sejak diberlakukan sudah ada puluhan kasus setiap tahun bersinggungan dengan UU ITE. Puncaknya, lebih dari 290 kasus pada tahun 2018 yang sebagian jumlah kasusnya menimbulkan perdebatan keras karena terpengaruh tensi politik yang saat itu beririsan dengan masa kampanye Pemilihan Umum 2019.

Belajar dari banyaknya polemik, tengah diupayakan penyusunan pedoman interpretasi UU ITE mengingat banyaknya pasal-pasal multitafsir. Pedoman interpretasi tersebut nantinya akan dijadikan rujukan bagi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang menggunakan UU ITE agar memiliki pemahaman yang sama. Meski demikian, proses revisi UU ITE tahun 2021 hendaknya tetap dilanjutkan dengan berbagai kajian mendalam yang penuh kehati-hatian. Dalam revisi harus jelas poin-poin serta batasan-batasan dalam mengeskpresikan kebebasan pendapat yang bertanggungjawab dan berkeadilan tanpa bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Ruang Digital

Proses revisi UU ITE sewajarnya selaras dengan perkembangan dunia teknologi informasi yang cepat dan dinamis. Sehingga, poin-poin revisi lebih ditekankan pada penguatan pengelolaan serta menata teknologi informasi, dan bukan pada memperkuat sanksi pidana. Penataan ruang-ruang digital yang dikelola sejatinya dapat memberi kepastian warga negara untuk memenuhi kebutuhan informasi. Yang nantinya akan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban. Namun demikian, penataan ruang-ruang digital juga sebaiknya satu paket dengan perlindungan warga negara dari kejahatan dunia maya atau *cybercrime* termasuk penipuan, ujaran kebencian, maupun pelecehan Suku-Agama-Ras-Antargolongan (SARA).

Revisi UU ITE perlu diimbangi penguatan literasi terutama literasi dalam menggunakan media sosial. Mengingat, penduduk indonesia di media sosial merupakan salah satu yang paling aktif di dunia. Dalam kuartal kedua 2017, Facebook Indonesia mencatat orang Indonesia memposting tiga kali lebih banyak dibanding rata-rata global. Sedangkan sepanjang 2016, jumlah kicauan pengguna Twitter dari Indonesia mencapai 4,1 miliar. Keaktifan yang besar tersebut perlu diimbangi dengan keterampilan untuk menganalisis, membandingkan, serta mengkritisi sebuah tulisan atau informasi.

Harapannya, agar tidak hanya mampu memahami isi pesan dalam sosial media. Namun juga mampu mengembangkan menganalisa validitas atau kebenaran isi pesan serta membandingkan dengan info pembanding. Sehingga, pesan-pesan hoaks dan provokatif dapat diminimalisir.

) Pangky Febriantanto SIP MIP,
Dosen & Plt Sekprodi Administrasi Publik Fisipol UP 45 Yogyakarta

Pojok KR

Vaksinasi guru, disambut antusias.
-- Vaksinasi wartawan, masih banyak yang antre.

***

Disdikpora DIY dukung tatap muka mulai Juli.
-- Padahal vaksinasi baru 10 persen dari target.

***

Kelanjutan bantuan produktif UMKM tunggu pusat.
-- Kalau masih ada dananya.

Berabé

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.
Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.